

KEPENTINGAN KEAMANAN NASIONAL AUSTRALIA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA *DEFENCE COOPERATION PROGRAM* DI TIMOR LESTE TAHUN 2002-2012

Nancy Louisa Angkie, Ni Wayan Rainy Priadarsani, Anak Agung Ayu Intan Prameswari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: pucelle064@gmail.com, rainypriadarsini@yahoo.com, prameswari.intan@gmail.com

ABSTRAK

Defence Cooperation Program (DCP) merupakan sebuah kerjasama pertahanan yang dilaksanakan antara badan pertahanan Australia dan Timor Leste. Kerjasama ini ditujukan Australia untuk meningkatkan kapabilitas badan pertahanan nasional Timor Leste, bernama F-FDTL, lewat penyediaan bantuan keuangan dan pelatihan. Apabila dilihat secara sekilas, bisa dianggap bahwa Timor Leste merupakan pihak yang diuntungkan dengan pelaksanaan kerjasama ini, akan tetapi penelitian ini mendapati bahwa Australia tidak bekerjasama tanpa terdorong oleh kepentingan-kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Australia memiliki kepentingan keamanan dalam dua area keamanan, yakni keamanan militer dan keamanan maritim, yang menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini.

Kata kunci : *kepentingan keamanan nasional, keamanan militer, keamanan maritim, Australia, Timor Leste*

1. PENDAHULUAN

Hubungan kerjasama antar negara telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat terelakkan dengan tingginya tingkat saling keterkaitan dan ketergantungan yang ada dalam sistem internasional saat ini. Setiap negara menginginkan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakatnya, akan tetapi keamanan satu negara dengan negara lain saling terkait (*interconnected*) dan tidak dapat terpisahkan sehingga hubungan kerjasama menjadi jembatan penghubung bagi dua (atau lebih) negara untuk menghadapi permasalahan bersama (Jackson & Sorensen, 1999, hal. 205; Buzan, 2003, hal. 43). Oleh karena itu, terbentuklah pola hubungan antar negara dalam era globalisasi di mana negara-negara cenderung menjalin kerjasama dengan negara lain demi memenuhi berbagai kebutuhan dan mencapai kepentingan-kepentingannya.

Kemerdekaan Timor Leste di tahun 2002 sebagai negara terbaru di dunia pada abad ke - 21 turut membawa berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi oleh Timor Leste sebagai negara baru saat itu adalah untuk membangun badan-badan pemerintahan. Salah satu badan pemerintahan yang sangat penting

dalam mengkokohkan kedaulatan sebagai sebuah negara adalah badan pertahanan nasional. Pertahanan nasional merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi semua negara sehingga tanpa memiliki suatu lembaga, atau semacam struktur dan strategi pertahanan, negara tidak dapat menjamin keamanan bagi masyarakatnya dari ancaman luar (Buzan, 1983, hal. 1, 159). Oleh karena keterbatasan Timor Leste secara domestik khususnya keterbatasan sumber daya manusia dan tenaga ahli, Timor Leste perlu melakukan kerjasama dengan negara lain dalam membangun badan pertahanan nasionalnya sehingga terbentuklah sebuah hubungan kerjasama antara Timor Leste dan Australia.

Defence Cooperation Program (DCP) merupakan sebuah kerjasama pertahanan yang terjalin antara Timor Leste dan Australia yang telah berlangsung sejak tahun 2001, dilakukan dengan tujuan mendasar untuk membantu Timor Leste membangun lembaga pertahanan nasionalnya yang lebih mapan, profesional dan mandiri. Australia telah menghabiskan anggaran dana dengan total sekitar 85,3 juta dolar Australia dari tahun 2002 hingga tahun 2012 untuk program tersebut (*Australian Strategic Policy Institute*, 2013, hal. 14), yang digunakan

untuk pembangunan fasilitas infrastruktur, pertukaran personel militer antara kedua negara, dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi pembangunan badan pertahanan nasional Timor Leste.

Melalui program kerjasama dengan Australia tersebut, Timor Leste telah mendirikan badan pertahanan nasionalnya, yang sejak tahun 2001 dikenal sebagai *Falintil-Forças de Defesa de Timor Leste* atau disingkat F-FDTL. Kuantitas dana yang dihabiskan Australia tersebut dapat dikatakan signifikan, mengingat kecilnya populasi Timor Leste yang hanya berjumlah kurang lebih 1 juta penduduk dan personel militer yang jumlahnya berkisar antara 650-1,435 personel antara tahun 2002-2006 (*Office of the Secretary of State for Promotion of Equality*, 2014, hal. 8, 35; *United Nations Independent Special Commission of Inquiry for Timor Leste*, 2006, hal.53). Pelatihan-pelatihan yang terlaksana melalui DCP tidak hanya mencakup pelatihan infanteri (pertempuran) saja, tetapi pelatihan medis, logistik, komunikasi, lingual, teknik, finansial, keamanan maritim, perancangan kebijakan, pembuatan kebijakan, dan lainnya (*Australian Strategic Policy Institute*, 2013, hal. 33).

Kerjasama DCP ini jelas sangat dibutuhkan oleh Timor Leste sebagai negara baru yang masih lemah, baik dari sisi ekonomi, institusi pemerintahan dan kapasitas sumber daya manusia. Melalui kerjasama ini, Timor Leste dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, dalam membangun pertahanan nasionalnya. Negara merupakan aktor egois rasional yang mengejar kepentingan-kepentingannya (Jonsson, Tallberg, 2001, hal. 11) sehingga bantuan yang diberikan Australia kepada Timor Leste tentunya dilakukan bukan untuk membantu Timor Leste semata. Kerjasama yang dilaksanakan ini dan berbagai bantuan yang disalurkan oleh Australia bagi pertahanan Timor Leste, dilakukan oleh Australia karena Australia memiliki kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya sendiri yang perlu dicapainya (*Australian Strategic Policy Institute*, 2002, hal. 1). Dalam sebuah konferensi pers di Canberra Agustus 2008, Menteri Pertahanan Australia Joel Fitzgibbon mengatakan, "*Australia's national security interests require that we have a good relationship with our near neighbour East Timor, that we have a stable East Timor, that we have prosperous East Timor and that we have an East Timor anchored into a strong path for development for the future*" (www.nautilus.org). Dari pernyataan

tersebut, terlihat bahwa kerjasama tersebut tidak sekedar dilakukan Australia untuk membantu Timor Leste tetapi terdapat kepentingan-kepentingan keamanan nasional Australia yang ingin dicapai. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin menelaah lebih lanjut kepentingan-kepentingan keamanan nasional Australia tersebut yang mendorong terbentuknya kerjasama pertahanan *Defence Cooperation Program* antara Australia dan Timor Leste dari tahun 2002 hingga 2012.

2. KONSEP

2.1. Keamanan Nasional

Perilaku setiap negara bergantung pada kebutuhannya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional atau *national interest* merupakan nilai-nilai, keinginan-keinginan, dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi negara atau ingin dicapai oleh negara-negara, dalam hubungannya satu sama lain.

"The values, desires and interests which states seek to protect or achieve in relation to each other" (Dyke, 1966).

Kepentingan nasional suatu negara dapat mencakup kepentingan-kepentingan vital negara untuk melindungi keamanan pertahanan militer, melindungi kesejahteraan ekonomi negaranya, mengejar kekuasaan ataupun ideologi dalam sistem internasional, juga menjaga sumber daya alam dan lingkungan (Perwita, Yani, 2005, hal. 35; Papp, 1997, hal. 43). Terdapat berbagai macam bentuk kepentingan nasional dan dalam penelitian ini kepentingan nasional yang ditelaah dibatasi pada bagian keamanan nasional suatu negara.

Istilah keamanan nasional mengacu pada konteks keamanan di mana negara menjadi aktor utama yang memerlukan keamanan dan mengejar keamanan tersebut. Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, yang di tahun 2008 mengartikan keamanan nasional Australia sebagai, "*freedom from attack or the threat of attack; the maintenance of our territorial integrity; the maintenance of our political sovereignty; the preservation of our hard won freedoms; and the maintenance of our fundamental capacity to advance economic prosperity for all Australians*" (Ungerer, 2010, hal. 2). G. Kennan (1948) mengartikan keamanan nasional sebagai "*the continued ability of the country to pursue the development of its internal life without serious interference, or threat of interference, from foreign powers*" atau kemampuan yang

berkelanjutan yang dimiliki suatu negara untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan internalnya tanpa gangguan, atau ancaman akan adanya gangguan dari kekuatan-kekuatan asing (dikutip dari Bergen, Garrett, 2005, hal. 2).

Menurut Prabhakaran Paleri (2008), *national security* dapat dikatakan sebagai “*the whole range of measures affecting the welfare of a population, as well as provision against aggression from abroad or subversion within*” atau seluruh tindakan-tindakan yang berdampak pada kesejahteraan sebuah populasi, dan perlindungan terhadap agresi dari luar maupun pemberontakan dari dalam (Paleri, 2008, hal. 25). Paleri dalam bukunya berjudul “*National Security: Imperatives and Challenges*” (2008) membagi keamanan nasional menjadi 15 bagian, yakni, *military security, economic security, resource security, border security, demographic security, disaster security, energy security, geostrategic security, informational security, food security, health security, ethnic security, environmental security, cyber security, genomic security* (Paleri, 2008).

Penelitian ini akan melihat kepentingan keamanan nasional Australia dalam dua sektor keamanan yang disebutkan Paleri, yakni *military security* (keamanan militer) dan *border security* (keamanan perbatasan). Keamanan perbatasan sendiri terdiri atas keamanan perbatasan darat, laut dan udara sehingga penulis memilih untuk membatasi pembahasan penelitian hanya pada keamanan laut atau *maritime security* saja. Dalam buku “*National Security: Imperatives and Challenges*” (2008) Paleri tidak secara mendalam membahas tentang keamanan maritim. Akan tetapi, Paleri kemudian menulis buku berjudul “*Maritime Security: the Unlawful Dimension*” (2010) dan “*Integrated Maritime Security: Governing the Ghost Protocol*” (2014) di mana Paleri kemudian membahas konsep dan permasalahan keamanan maritim secara lebih mendalam.

Keamanan militer merupakan sektor keamanan nasional pertama yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Keamanan militer merupakan elemen tertua dan elemen yang paling utama dalam keamanan nasional. Paleri mengemukakan, “*military security means, preventing and suppressing alien invasions with the use of military force by combat or preventive deterrence*” (Paleri, 2008, hal. 125). Sebuah negara memerlukan kekuatan militer dalam melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya dari ancaman luar. Keamanan militer merupakan kebutuhan suatu negara menggunakan militer

untuk melindungi negaranya dari serangan fisik (Paleri, 2008, hal. 66-67). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keamanan militer mengacu pada kemampuan militer suatu negara dalam melindungi teritori, aset-aset dan populasi yang ada didalam wilayah tersebut dari serangan fisik atau bersenjata. Paleri mengatakan bahwa keamanan militer tidak harus dilihat secara tradisional dalam artian perang saja (Paleri, 2008, hal.150). Oleh karena itu isu-isu keamanan militer tidak hanya terbatas pada permasalahan perang saja melainkan ancaman militer lain seperti pemberontakan bersenjata (*insurgencies*) dan aksi terorisme (Buzan, Waevar, Wilde, 1998, hal. 50).

Sektor keamanan nasional kedua yang akan turut dibahas dalam penelitian ini adalah sektor keamanan maritim yang merupakan salah satu bagian dari keamanan perbatasan. Paleri mendefinisikan keamanan maritim sebagai asimilasi antara atribut-atribut yang dimiliki oleh laut dan entitas geopolitik suatu negara dengan elemen-elemen keamanan nasionalnya, yang digunakan secara maksimal oleh pemerintahannya agar bisa bermanfaat atau menguntungkan bagi masyarakatnya (Paleri, 2014, xi). Keamanan maritime atau *maritime security* merupakan jenis keamanan yang terkait pada perlindungan suatu negara terhadap berbagai ancaman-ancaman yang terjadi di laut (Bueger, 2015, hal. 2).

Keamanan maritim mencakup permasalahan yang cukup luas, mulai dari perselisihan tentang batas laut antar negara, pergerakan manusia dan barang di laut, aksi-aksi pembajakan di laut, manajemen sumber daya alam di laut, pengambilan sumber daya alam laut secara ilegal (seperti penangkapan ikan secara ilegal), permasalahan lingkungan (seperti kecelakaan dan bencana yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut), dan lainnya (Bueger, 2015, hal. 2; Paleri, 2008, hal. 194, 203, 204). Dalam penelitian ini pembahasan tentang keamanan maritim akan dibatasi pada ancaman-ancaman keamanan yang bersumber dari aktivitas transnasional ilegal khususnya permasalahan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), perpindahan masyarakat secara ilegal (seperti permasalahan pengungsi dan penyelundupan manusia) dan juga penyelundupan narkoba (*drugs trafficking/smuggling*) dimana isu-isu tersebut merupakan permasalahan yang dialami oleh Australia dan Timor Leste di Laut Timor yang membatasi kedua negara. Isu-isu keamanan maritim tersebut akan dibahas dari sudut pandang Australia dimana lewat kerjasama

DCP, Australia dianggap tidak hanya sekedar membantu Timor Leste meningkatkan kapasitas pertahanan nasionalnya saja tetapi Australia turut mengejar kepentingan keamanan nasionalnya dalam sector keamanan maritim.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami suatu fenomena secara holistik, artinya subjek penelitian tidak diisolasi melainkan diamati di latar dan konteks alamiah subjek. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti biasanya melakukan wawancara, pengamatan atau memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada sebagai sumber informasi dan data (Moleong, 2011. hal. 2-6). Sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen negara yang terkait seperti *Defence White Papers* yang dipublikasi oleh Kementerian Pertahanan Australia, tulisan-tulisan ilmiah dari institusi seperti Australia Strategic Policy Institute (ASPI), dan referensi-referensi lain berbentuk buku atau artikel yang didapat secara *online*.

4. KEPENTINGAN KEAMANAN NASIONAL AUSTRALIA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA DEFENCE COOPERATION PROGRAM DI TIMOR LESTE TAHUN 2002-2012

4.1. Kepentingan Keamanan Australia dalam Sektor Keamanan Militer (*Military Security*)

Pemerintah Australia mempublikasi *Defence White Paper* di tahun 2009 di mana kepentingan-kepentingan keamanan nasional Australia yang diutarakan, masih bersifat konsisten dengan substansi *Defence White Paper* Tahun 2000 maupun *National Security Statement* (2008). Dalam *Defence White Paper* tahun 2009, pemerintah Australia menyatakan kepentingan keamanan Australia yang utama yakni, kepentingan untuk melindungi Australia dari serangan bersenjata (*direct arm attack*).

“Australia's most basic strategic interest remains the defence of Australia against direct armed attack. This includes armed attacks by other states and by non-state actors with the capacity to employ strategic capabilities, including weapons of mass destruction (WMD)” (Defence White Paper, 2009, hal. 12).

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa kepentingan keamanan nasional Australia yang utama adalah untuk melindungi Australia dari serangan bersenjata, baik oleh aktor negara maupun non-negara. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, Australia tidak terlepas dari keberadaan negara-negara yang berada di sekitar Australia.

“Our next most important strategic interest is the security, stability and cohesion of our immediate neighbourhood, which we share with Indonesia, Papua New Guinea, East Timor, New Zealand and the South Pacific island states. While we have a wide range of diplomatic, economic, cultural and other links with those countries, from a strategic point of view, what matters most is that they are not a source of threat to Australia, and that no major military power, that could challenge our control of the air and sea approaches to Australia, has access to bases in our neighbourhood from which to project force against us” (Defence White Paper, 2009, hal. 12).

Pernyataan di atas yang dikutip dari *Defence White Paper 2009*, memaparkan bahwa Australia menginginkan stabilitas keamanan bagi negara-negara tetangganya. Australia ingin agar negara-negara tetangganya tidak menjadi ancaman bagi Australia, ataupun dikuasai oleh kekuasaan asing yang dapat menggunakan wilayah-wilayah tetangga tersebut digunakan untuk menyerang Australia lewat laut atau udara.

Kerjasama *Defence Cooperation Program* yang dilakukan Australia dengan Timor Leste sangat berkaitan erat letak geografis Timor Leste yang sangat dekat dengan benua Australia (seperti yang terlihat dalam Gambar 4.5.1). Untuk memenuhi kepentingan Australia dalam melindungi negaranya, keamanan Australia tidak terisolasi dan terhubung dengan keberadaan negara-negara disekitarnya. Oleh karena itu, dalam strategi keamanannya, Australia tidak dapat mengabaikan keberadaan negara-negara yang berdekatan dengan benua Australia dan turut menginginkan kestabilan keamanan bagi negara-negara sekitarnya.

Kekhawatiran Australia terkait Timor Leste sebagai negara tetangganya mencakup beberapa hal. Dalam hal keamanan militer, Australia mengkhawatirkan apabila:

1. Timor Leste diintervensi atau dikuasai oleh kekuatan militer asing yang dianggap mengancam Australia dan dapat menggunakan Timor Leste secara

strategis untuk melakukan penyerangan terhadap Australia lewat laut maupun udara;

2. Timor Leste beraliansi/bersekutu secara militer dengan kekuatan asing yang dianggap dapat mengancam Australia dan sekutunya;
3. Timor Leste menjadi negara gagal sehingga pemerintahannya kehilangan kendali, membuat Timor Leste dikuasai oleh kelompok-kelompok pemberontak bersenjata, atau diinfiltrasi oleh gerakan-gerakan terorisme.

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan tiga kepentingan keamanan militer utama yang dimiliki Australia dalam melakukan kerjasama pertahanan dengan Timor Leste.

Kepentingan keamanan militer pertama Australia melaksanakan kerjasama DCP dengan Timor Leste adalah agar Timor Leste tidak diserang atau diinvasi oleh kekuatan militer asing, maupun digunakan secara geostrategis bagi kekuatan asing untuk menyerang Australia. Kedua, bahwa Australia dan sekutunya tetap menjadi rekan kerjasama pilihan Timor Leste dalam pertahanan dan keamanan dan tidak melakukan aliansi militer dengan kekuatan yang dianggap dapat mengancam Australia. Ketiga, bahwa Australia berkepentingan dalam mendukung pemerintahan yang lebih kuat dan mapan di Timor Leste sehingga Timor Leste dapat lebih stabil secara domestik dan mampu mencegah atau mengatasi berbagai ancaman keamanan seperti pemberontakan bersenjata maupun gerakan terorisme yang turut membawa rasa ketidakamanan bagi Australia sendiri.

Kekhawatiran Australia akan serangan bersenjata yang dilakukan oleh musuh dengan menggunakan negara-negara tetangga yang secara geografis dekat dengan Australia, merupakan suatu kekhawatiran yang dapat dikatakan berasal dari pengalaman Australia di masa Perang Dunia II. Pada 19 Februari 1942, Australia untuk pertama kalinya diserang oleh pasukan Jepang dengan penyerangan udara. Pasukan Jepang menggunakan 54 pesawat pembom daratan dan 188 pesawat tempur, yang diluncurkan dari 4 kapal induk yang diposisikan di Laut Timor. Penyerangan Jepang tersebut menyebabkan banyak kerusakan terhadap infrastruktur militer maupun sipil di Darwin, Australia, dan banyak korban yang terluka maupun meninggal akibat penyerangan tersebut (www.anzacday.org.au).

Pasukan Australia dan sekutu akhirnya memulai kampanye gerilya melawan pasukan

Jepang yang menginvasi Timor Portugis (yang sekarang dikenal sebagai Timor Leste). Berkat dukungan masyarakat Timor Portugis, pasukan Australia dan pasukan sekutu walaupun dengan jumlah yang sedikit, berhasil melakukan perang gerilya melawan 10.000 pasukan Jepang dan pasukan Jepang akhirnya mundur pada akhir tahun 1943 (www.museum.wa.gov.au). Tanpa bantuan dan pengorbanan masyarakat lokal saat itu, tentara Australia dan sekutu tidak mungkin mampu melaksanakan gerilya di medan perang yang sama sekali tidak dikenal oleh pasukan Australia dan sekutu.

Apabila saat itu pasukan Australia gagal mengusir pasukan Jepang dari pulau Timor, maka Jepang bisa saja melanjutkan invasinya terhadap Australia dan bisa menguasai Australia. Kemunduran pasukan Jepang dari pulau Timor yang berdekatan dengan Australia, tidak hanya menghasilkan rasa aman bagi masyarakat pulau Timor saja tetapi juga bagi masyarakat Australia. Prinsip yang sama dapat dikatakan masih berlaku hingga saat ini, bahwa agresi militer yang terjadi pada negara-negara tetangga Australia turut dianggap sebagai ancaman militer bagi Australia. Oleh karena itu, dari pengalaman di masa lampau Australia sadar akan pentingnya menjalin hubungan yang positif dengan negara-negara tetangganya, sehingga membangun hubungan-hubungan bilateral dengan negara-negara sekitarnya khususnya dalam bidang pertahanan merupakan kunci dalam agenda pertahanan Australia (*Australian Strategic Policy Institute*, 2013, hal. 17). Kemapanan pertahanan Timor Leste tidak hanya akan berdampak positif bagi Timor Leste saja, tetapi juga diperhitungkan sebagai hal yang positif bagi keamanan Australia sendiri khususnya pada waktu perang. Ketidakmampuan Timor Leste dalam menghadapi agresi militer dari luar akan turut membawa dampak-dampak negatif terhadap keamanan Australia sendiri. Oleh karena itu, melalui DCP Australia membantu pemerintah Timor Leste dalam membangun kapasitas badan pertahanan nasional yang lebih baik lagi, sehingga Timor Leste dapat memiliki kemampuan untuk mencegah dan melindungi negaranya dari agresi militer kekuasaan asing yang tidak diinginkan.

Kekhawatiran Australia yang kedua terkait Timor Leste adalah arah pembentukan aliansi yang dijalin Timor Leste dengan negara-negara lain selain Australia. Australia memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa Australia tetap menjadi negara pilihan rekan kerjasama dalam keamanan, bagi negara-negara dalam

kawasan (Klaxton, 2013, hal. 1). Kepentingan Australia menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara dalam kawasan, tidak terlepas dari adanya keinginan Australia untuk mempertahankan pengaruhnya dan pengaruh sekutunya dalam kawasan. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya *power rivalry* (kompetisi kekuasaan) antara kekuatan-kekuatan besar dalam kawasan, yakni antara Amerika Serikat, dengan China yang memiliki pengaruh dalam kawasan Asia Pasifik yang semakin meningkat. Kebangkitan China tersebut dikatakan turut berdampak pada kebijakan strategis Australia.

"But the biggest changes to our outlook over the period have been the rise of China... the beginning of the end of the so-called unipolar moment; the almost two-decade-long period in which the pre-eminence of our principal ally, the United States, was without question...China's rise in economic, political and military terms has become more evident. Pronounced military modernisation in the Asia-Pacific region is having significant implications for our strategic outlook" (Defence White Paper, 2009, hal. 9, 16)

Kepentingan-kepentingan Australia terkait Timor Leste tidak terlepas dari adanya kebangkitan pengaruh militer China di Asia Pasifik. Australia ingin untuk menjadi rekan kerjasama pilihan Timor Leste, akan tetapi kepentingan tersebut tidak terlepas dari adanya kompetisi dengan kekuatan besar China. Dalam laporan ASPI, Australia menyebutkan bahwa China telah mendanai pembangunan Istana Kepresidenan Timor Leste, bangunan Kementerian Luar Negeri, markas F-FDTL, dan juga melakukan beberapa program pelatihan dengan F-FDTL. Dari bantuan-bantuan tersebut terlihat bahwa Australia bukanlah satu-satunya negara yang melakukan pendekatan dengan Timor Leste dalam bidang militer. Antara tahun 2002 hingga 2009, China memberikan bantuan untuk militer Timor Leste sejumlah 1 juta dolar Amerika Serikat untuk pengadaan peralatan-peralatan seperti tenda, seragam, dan kendaraan bermotor (dalam bentuk mobil Jeep) untuk militer Timor Leste. China juga telah menghabiskan 6 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun akomodasi bagi personel-personel F-FDTL dan menyediakan pendidikan bagi 20 personel militer F-FDTL di China. Pada tahun 2007, pemerintah Timor Leste membeli 8 mobil jeep bersenjata dari China. Peran China meningkat di tahun 2008 saat Timor Leste

membeli dua kapal patrol dari China untuk Angkatan Laut F-FDTL dengan kontrak senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut turut termasuk dengan penyediaan pelatihan oleh China untuk 40 personel Angkatan Laut F-FDTL dan pembangunan pelabuhan kecil di pesisir Selatan Timor Leste (www.jamestown.org). Kehadiran China tersebut sempat menyebabkan kekhawatiran bagi pemerintah Australia.

"East Timor signed an agreement with the Chinese government for the sale of two long range patrol boats in April this year - a decision that created uproar in the Australian media, with the country's top strategic thinkers and politicians issuing comments on the matter" (Horta, 2008).

Australia tidak menyembunyikan bahwa kehadiran kekuatan atau pengaruh lain di Timor Leste, khususnya China turut menjadi perhatian bagi Australia.

"For Australia, the increasing assertiveness and almost certain expansion of China's 'soft power' approach towards Timor-Leste will challenge Canberra's political influence. For a variety of reasons, Australia has a special interest in the degree and type of interest shown in Timor-Leste by large, growing and not necessarily benign powers... (ASPI, 2013, hal.4).

Walaupun Timor Leste hingga saat ini belum menjalin aliansi militer yang mengikat dengan negara mana pun, akan tetapi dari pernyataan-pernyataan yang diutarakan badan pertahanan Australia maupun ASPI, terlihat bahwa Australia memiliki kepentingan untuk menanamkan pengaruh secara militer di Timor Leste dan ingin mencegah agar Timor Leste menjalin aliansi militer yang mengikat dengan negara lain, khususnya dengan China. Oleh karena itu, *Defence Cooperation Program* merupakan medium yang penting bagi pendekatan Australia terhadap Timor Leste dalam bidang pertahanan, untuk menjadikan dan mempertahankan Australia sebagai partner keamanan pilihan bagi Timor Leste dan menahan dominasi pengaruh kekuasaan atau aliansi lain di Timor Leste.

Permasalahan ketiga dalam keamanan militer yang menjadi kekhawatiran bagi Australia adalah lemahnya Timor Leste sebagai negara baru. Timor Leste dikhawatirkan beresiko menjadi negara gagal di mana apabila pemerintahannya tidak mampu membangun pemerintah yang mapan maka pemerintahnya dapat kehilangan kendali dan keteraturan secara domestik. Mark

R. Duffield dalam bukunya *'Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security'* (2009) mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan keamanan baru yang muncul tidak hanya bersifat tradisional (dalam arti perang antar negara), tetapi adanya ketakutan akan konflik, aktivitas-aktivitas kriminal dan instabilitas internasional yang disebabkan oleh negara-negara lemah. Di abad ke 21, terdapat kepercayaan bahwa ancaman-ancaman keamanan dianggap lebih mungkin timbul dari adanya negara-negara lemah atau gagal, atau bahkan aktor-aktor non-negara (Duffield, 2009, hal. 422).

Dalam buku *'Australia's Arc of Instability: The Political and Cultural Dynamics in Regional Security'* (2006) oleh Rumley, Forbes dan Griffin, memaparkan tentang kumpulan negara-negara yang dijuluki *arc of instability* atau lengkungan instabilitas, yang berada di dekat Australia. Negara-negara tersebut antara lain adalah Indonesia, Timor Leste, Fiji, Indonesia, New Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands dan Vanuatu. Negara-negara ini disebut sebagai *arc of instability* oleh Australia karena dianggap sebagai wilayah yang rawan konflik, lemah dari segi pemerintahan maupun pembangunan dan mengakibatkan instabilitas terhadap keamanan kawasan (Rumley, Forbes, Griffin, 2006).

Rumley, Forbes dan Griffin (2006) mengatakan, *"To sum it up, East Timor is partly vulnerable to the kind of instability that could impact on Australia's security"* (Rumley, Forbes dan Griffin, 2006, hal. 109). Dalam buku tersebut, para penulis menjelaskan berbagai macam permasalahan sosial-politik yang dihadapi Timor Leste sebagai negara baru yang menyebabkan instabilitas secara domestik. Instabilitas yang dialami Timor Leste tersebut dikatakan tidak hanya mengancam Timor Leste sendiri tapi juga turut berdampak pada keamanan Australia. Dalam penelitian ini, penulis menemukan dua ancaman keamanan militer yang dapat timbul disebabkan oleh pemerintahan Timor Leste yang lemah dan ketidakstabilan sosial-politik Timor Leste, yang mana ancaman-ancaman tersebut turut menjadi kekhawatiran Australia. Pertama, yang dikhawatirkan oleh Australia adalah munculnya aktor-aktor non-negara seperti kelompok pemberontak bersenjata (*insurgencies*). Ancaman militer kedua yang dikhawatirkan Australia adalah infiltrasi kelompok-kelompok terorisme di Timor Leste maupun negara-negara lemah lainnya di sekitar Australia.

Lemahnya kapasitas suatu pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan dan kendali atas negaranya, dapat berakibat pada munculnya kelompok-kelompok bersenjata (*insurgents*) yang tidak taat pada hukum dan menyebabkan berbagai macam konflik dan kekerasan yang mengancam masyarakat secara domestik maupun secara regional. Timor Leste sebagai negara lemah, telah mengalami berbagai gejala sosial-politik secara domestik. Konflik bersenjata yang disebabkan oleh munculnya kelompok pemberontak bersenjata (*insurgency*) sudah pernah dialami oleh Timor Leste. Pada tahun 2006 muncul kerusuhan yang bermula dari ketidakpuasan anggota-anggota F-FDTL, berujung pada terbentuknya kelompok pemberontak bersenjata yang dipimpin oleh Mayor Alfredo Reinaldo yang keluar dari F-FDTL bersama anggota-anggota kelompok pemberontaknya. Perseteruan antara kelompok pemberontak dengan pemerintah berujung pada berbagai macam aksi kekerasan. Konflik tersebut menyebabkan aksi saling tembak antara F-FDTL dengan kelompok pemberontak (mantan-mantan anggota F-FDTL), dan juga antara anggota-anggota F-FDTL dengan anggota-anggota Kepolisian nasional Timor Leste (PNTL). Krisis keamanan tersebut, mengakibatkan 150,000 masyarakat Timor Leste terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan hidup sebagai pengungsi (*internally displaced persons*) (IOM, 2012, hal. 18). Konflik tersebut turut berakibatkan pada terjadinya upaya asasinasi terhadap presiden Timor Leste Dr. Jose Ramos Horta di awal tahun 2008. Australia pun akhirnya memimpin pasukan perdamaian yang disebut *International Stabilisation Force* (ISF) bekerja sama dengan pasukan perdamaian Portugal, New Zealand dan Malaysia, dan membantu pemerintah Timor Leste memulihkan keamanan domestik Timor Leste (www.nautilus.org).

Krisis keamanan yang berlangsung di tahun 2006-2008 tersebut merefleksikan kerapuhan institusi-institusi pemerintah Timor Leste dan kurangnya kompetensi penegakan hukum di Timor Leste oleh anggota-anggota dari institusi pemerintah termasuk institusi F-FDTL. Penting bagi Australia untuk membantu Timor Leste yang merupakan salah satu negara terlemah di dunia, untuk menjadi negara yang lebih kuat dalam pemerintahannya dan mencegah Timor Leste menjadi negara gagal. Berbagai konflik dan instabilitas yang menimpa Timor Leste, akan turut berdampak pada munculnya berbagai resiko keamanan terhadap Australia dan kawasan. Oleh karena itu *Defence Cooperation*

Program, merupakan salah satu upaya Australia untuk memperkuat institusi pemerintah Timor Leste khususnya dalam pertahanan, sehingga Timor Leste dapat menjadi negara yang lebih mandiri dan mapan dalam mengatasi tantangan-tantangan keamanan yang muncul dari dalam maupun luar.

Selain permasalahan pemberontakan bersenjata, permasalahan lain yang menjadi perhatian Australia dalam hubungan keamanannya dengan negara-negara lemah disekitarnya adalah permasalahan terorisme. Aksi terorisme sendiri masih belum dialami langsung oleh Timor Leste. Akan tetapi dengan maraknya penyebaran gerakan terorisme di kawasan Asia maupun di dunia, pemerintah Australia ingin memastikan bahwa negara-negara dalam kawasan mendapatkan dukungan yang cukup dalam mencegah, menghadapi, maupun mengakhiri gerakan-gerakan terorisme.

“Since the September 11 tragedy, concern has risen that so-called “failed states,” losing the struggle to maintain law and order at home, could become springboards for terrorism...Canberra’s major concern was the disintegration of state authority that would enable terrorist organizations to reproduce themselves through what Tobias Debiel has called “markets of violence.” Hence, the strategy was to target the state: intervene, rebuild, and strengthen the state in order to prevent it from “failing” or becoming a “rogue” state that could be exploited for networks of violence” (Kabutaulaka, 2004, hal.1,4,5).

Sejak terjadinya aksi teroris 9/11, negara-negara di dunia termasuk Australia mulai memperhitungkan dampak-dampak negatif dari keberadaan negara-negara lemah sebagai ancaman keamanan kawasan dan dunia.

Kejadian bom Bali di tahun 2002, membunuh 202 orang yang 88 di antaranya adalah warga Australia. Kemudian di tahun 2004, kedutaan Australia di Jakarta mendapat serangan teroris dalam bentuk bom yang ditaruh di dalam mobil dan menewaskan 10 orang korban (www.nationalsecurity.gov.au). Kejadian-kejadian seperti ini turut mempengaruhi sikap Australia dengan kesadaran bahwa ancaman terorisme merupakan ancaman yang nyata bagi Australia. Serangan-serangan teroris yang terjadi di Indonesia yang dekat secara geografis menciptakan kesadaran bagi Australia bahwa ancaman terorisme tidaklah begitu jauh dari Australia.

Walaupun aksi terorisme hingga saat ini belum terjadi di Timor Leste sendiri akan tetapi kekhawatiran akan terjadinya infiltrasi jaringan terorisme di Timor Leste merupakan sebuah kekhawatiran yang tidak diabaikan Australia. Pada tahun 2005, intelijen Indonesia sempat melaporkan pada pemerintah Timor Leste tentang 4 anggota Al-Qaeda (dua diantaranya warga Afrika Selatan, satu warga Kuwait dan satu warga Turki) yang dicurigai telah masuk ke Timor Leste lewat perbatasan Timor Leste dengan Nusa Tenggara Timur, Indonesia (www.smh.com.au). Laporan yang serupa kembali muncul di tahun 2012, di mana Komandan tentara Indonesia yang bertugas di perbatasan Indonesia-Timor Leste melaporkan pada otoritas keamanan Timor Leste di perbatasan bahwa sekelompok warga Saudi Arabia yang di catat sebagai anggota jaringan terorisme telah masuk ke Timor Leste dari NTT (www.easttimorlawandjusticebulletin.com). Dari laporan-laporan tersebut, terlihat bahwa kemungkinan jaringan teroris menginfiltrasi Timor Leste lewat perbatasan Timor Leste-Indonesia merupakan kemungkinan yang bisa terjadi. Infiltrasi jaringan terorisme di negara-negara sekitar Australia merupakan suatu kekhawatiran keamanan bagi Australia dan masuknya juga berkembangnya gerakan terorisme di Timor Leste tentunya ingin dihindari oleh Australia.

Dari kemunculan pemberontakan bersenjata di Timor Leste dan adanya berbagai kemungkinan infiltrasi jaringan terorisme di Timor Leste sebagai negara lemah, maka Australia berkepentingan untuk membantu Timor Leste menjadi negara yang lebih kuat dalam pemerintahannya dengan mendukung pembangunan badan-badan penegakan hukum yang kompeten. Dengan pemerintahan yang kuat dan badan-badan penegakan hukum yang lebih profesional dan efektif, Timor Leste akan lebih mampu mencegah dan menghadapi gejala-gejolak domestik, maupun mencegah terjadinya infiltrasi gerakan-gerakan terorisme di Timor Leste. Australia berharap bahwa melalui pelatihan-pelatihan keahlian yang diberikan DCP bagi personel-personel F-FDTL dalam keamanan perbatasan dan maritim, Australia mengharapkan F-FDTL dapat lebih efektif menjalankan tugasnya melindungi perbatasan dan menghindari infiltrasi-infiltrasi dari luar yang tidak diinginkan oleh Timor Leste maupun Australia.

4.1. Kepentingan Keamanan Nasional Australia dalam Sektor Keamanan Maritim (*Maritime Security*)

Dengan keberadaan negara-negara lemah di sekitar Australia, Australia tidak hanya mengkhawatirkan keamanan dari segi militer saja tetapi turut memperhitungkan ancaman-ancaman keamanan non-tradisional. Implikasi terhadap keamanan Australia dengan keberadaan Timor Leste sebagai negara lemah salah satunya adalah keamanan dan kedaulatan perbatasan maritim yang tidak terjaga secara optimal. Situasi seperti ini dapat berakibat pada maraknya aktivitas-aktivitas transnasional ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal trades*, *drugs trafficking*, *human trafficking*, *arms trafficking*, dan lain-lain. Pandangan tersebut terefleksikan secara konsisten dalam agenda keamanan yang disusun oleh Kementerian Australia melalui *Defence White Paper* tahun 2000, 2009, dan 2013.

Bateman dan Bergin melalui sebuah artikel mengatakan bahwa, Australia memiliki kepentingan vital dalam menjaga Laut Timor (*Timor Sea*) yang berbatasan langsung dengan benua Australia. Penting bagi Australia bahwa Timor Leste dapat membangun penegakan hukum dan pertahanan nasional yang baik sehingga Timor Leste tidak dijadikan negara transit untuk berbagai aktivitas ilegal.

“Australia has a vital interest in maintaining good order in the Timor Sea. It is important the weak domestic law-enforcement capabilities in East Timor do not create a situation where the country becomes a transit point for people-smuggling and illegal trafficking into Australia, as well as a support base for illegal, unregulated and unreported fishing in our seas. The southern waters of East Timor provide a safe haven for mother ships supporting illegal fishing in our offshore zone. Sri Lankan refugees have tried to enter Australia illegally from East Timor. And there have been attempts at smuggling drugs from the country to Australia” (Batemen, Bergin, 2012).

Bateman dan Bergin memaparkan bahwa Australia memiliki kepentingan vital dalam menjaga ketertiban di Laut Timor. Dikatakan bahwa sangat penting agar penegakan hukum domestik di Timor Leste tidak lemah sehingga Timor Leste dijadikan titik transit bagi kegiatan-kegiatan penyelundupan manusia maupun barang (dan narkoba) ke Australia, menjadi basis bagi kegiatan-kegiatan penangkapan ikan ilegal

di perairan Australia dan Timor Leste. Penulisan ini akan membahas keamanan maritim dengan fokus pada tiga permasalahan utama yang sudah disebutkan Bateman dan Bergin, yakni pertama, permasalahan penangkapan ikan secara ilegal, kedua pergerakan atau perpindahan manusia melewati laut secara ilegal dan ketiga permasalahan penyelundupan narkoba antar-batas negara. Ketiga permasalahan maritim tersebut dipilih karena dianggap memiliki urgensi terhadap keamanan maritim Australia terkait Timor Leste dan relevansi dengan pelaksanaan DCP.

Menurut *Australian Fisheries Management Authorities* (AFMA) jumlah perahu atau kapal yang ditangkap oleh pemerintah Australia terkait *illegal fishing* di perairan Utara Australia meningkat dari 78 di tahun 2000, menjadi 368 di Tahun 2006 (dikutip dari Rose, 2014, hal. 37). Sebagian besar perahu yang ditangkap berasal dari Indonesia, dan terkadang perahu berasal dari *Papua New Guinea* dan Taiwan juga pernah ditangkap di perairan Utara Australia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste (www.aic.gov.au). Tentunya dengan maraknya penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Laut Timor yang membatasi Australia dengan Timor Leste, Australia ingin agar Timor Leste dapat memiliki kapasitas penegakan hukum yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan tersebut, yang merugikan baik Australia maupun Timor Leste. Oleh karena itu, melalui *Defence Cooperation Program* yang dilakukan Australia dengan F-FDTL, Australia berharap Angkatan Laut F-FDTL bisa dapat dilatih dan memiliki keahlian yang lebih baik lagi dalam melakukan operasi-operasi militer di laut. Melalui DCP Angkatan Laut F-FDTL diberikan pelatihan-pelatihan dalam bidang keamanan perbatasan, keamanan maritime dan pelayaran untuk dapat berpatroli di perbatasan darat maupun laut dengan lebih baik. DCP juga mengadakan pelatihan-pelatihan bersama (*joint exercises*) dengan pasukan Australia dan pasukan Amerika Serikat sehingga keahlian yang diajarkan dapat langsung dipraktikkan.

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan Australia bersama Timor Leste dan juga bantuan Australia membangun Pangkalan Laut F-FDTL semua itu dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan praktis angkatan laut F-FDTL dalam menangani ancaman-ancaman maritim. Pada bulan Oktober 2010, Angkatan Laut F-FDTL berhasil menangkap 32 nelayan yang melakukan penangkapan ikan ilegal di Laut Timor. Dari 32 nelayan tersebut, 5 diantaranya merupakan

warga Indonesia, 3 warga Kamboja dan 24 warga Thailand (Tempo Semanal, 2010). Menurut Joao Da Silva, Komander Kedua Angkatan Laut F-FDTL, sejak berdirinya Angkatan Laut F-FDTL, mereka telah menangkap 100 nelayan yang melakukan penangkapan ikan ilegal di Laut Timor (www.easttimorlawandjusticebulletin.com).

Tidak hanya permasalahan *illegal fishing* menjadi masalah yang signifikan bagi Australia, tetapi juga permasalahan penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan masuknya pengungsi (*refugees* atau *asylum seekers*) ke Australia menggunakan perahu atau kapal melewati perairan bagian Utara Australia, yang berbatasan dengan Timor Leste dan Indonesia. Fenomena masuknya orang-orang secara ilegal ke Australia lewat laut menggunakan perahu atau kapal menjadi permasalahan yang signifikan bagi pemerintahan Australia sejak akhir 1990an di mana jumlah kapal-kapal dan orang-orang yang tiba di daratan Australia lewat laut secara ilegal mulai mengalami peningkatan (seperti yang terlihat di Tabel 4.5.3.).

Tahun	Jumlah Perahu	Jumlah Penumpang Perahu
1998	17	200
1999	86	3,721
2000	51	2,939
2001	43	5,516
2002	1	1
2003	1	53
2004	1	15
2005	4	11
2006	6	60
2007	5	148
2008	7	161
2009	60	2,867
2010	134	6,900
2011	69	4,733
2012	278	17,596

Tabel 4.5.3. Statistik *boat arrivals* ilegal di Australia

Sumber: www.aph.gov.au

Dapat dilihat dari angka-angka tersebut bahwa orang-orang yang masuk secara ilegal lewat laut dan tiba di Australia tiap tahunnya datang dalam jumlah yang bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi permasalahan yang sangat signifikan bagi Australia. Australia membutuhkan negara-negara tetangganya, khususnya Timor Leste dan

Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas keamanan maritim mereka sehingga kapal-kapal tersebut dapat dicegah untuk masuk ke wilayah Australia oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste.

Sejak tahun 2002, pemerintah Timor Leste turut menghadapi kehadiran pengungsi dan migran gelap yang menuju ke Australia lewat Laut Timor. Belum diketahui pasti banyaknya jumlah pengungsi dan migran gelap tersebut akan tetapi kasus yang signifikan diantaranya adalah penangkapan 56 warga Sri Lanka di tahun 2002 (www.unhcr.org) dan kemudian 26 orang Arakan (Burma) tanpa warga negara yang melakukan perjalanan menuju ke Australia lewat perairan Laut Timor di tahun 2012 (www.smh.com.au). Permasalahan pengungsi dan migran gelap yang dihadapi oleh Australia juga Timor Leste sempat mendorong Australia mengajukan *Processing Center* untuk pengungsi di tahun 2010, akan tetapi proposal Australia tersebut ditolak oleh Timor Leste. Oleh karena itu *Defence Cooperation Program* merupakan jalur lain bagi Australia dalam menghadapi permasalahan tersebut, dimana Australia dapat membantu Timor Leste meningkatkan pertahanannya dalam menjaga keamanan maritim dan perbatasan khususnya di Laut Timor. Australia berharap bahwa dengan melakukan kerjasama dengan Timor Leste, Australia dapat membantu Timor Leste menjadi negara yang lebih kuat dalam pertahanannya sehingga perbatasan Timor Leste dapat terjaga dengan baik dan dapat bersama-sama dengan Australia mengatasi ancaman-ancaman maritim yang muncul di Laut Timor. Keamanan maritim Australia dan Timor Leste saling terhubung satu sama lain, sehingga DCP dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan Timor Leste saja tetapi turut memenuhi kepentingan keamanan Australia dalam melindungi perbatasan wilayah maritimnya.

Selain mengkhawatirkan masuknya orang-orang secara ilegal ke Australia lewat perairan Laut Timor, Australia juga turut mengkhawatirkan arus pengungsi yang bisa berdatangan ke Australia apabila Timor Leste gagal dalam memegang kendali keamanan. Kedekatan geografis antara Timor Leste dengan Australia, berarti bahwa Australia menjadi salah satu destinasi pengungsi apabila terjadi konflik yang signifikan di Timor Leste.

“State failure in Timor-Leste can have severe consequences for regional security creating a refugee crisis and providing a safe haven for criminal organizations and other illicit

activities. Despite massive international support and oil money the country remains fragile” (Horta, 2014).

Kemungkinan munculnya arus pengungsi dari Timor Leste ke Australia bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, melihat pada pengalaman yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Saat Perang Dunia kedua, Australia menerima pengungsi-pengungsi pertama dari Timor Portugis di tahun 1945 sejumlah 600 orang. Kemudian pada tahun 1975, ketidakstabilan keamanan yang terjadi di Timor Portugis yang disebabkan oleh gerakan kemerdekaan melawan Portugal dan invasi Indonesia menyebabkan hampir 2,000 warga Timor Portugis ke Australia sebagai pengungsi. 1,647 warga Timor Portugis akhirnya menjadi warga negara Australia. Kemudian antara tahun 1990 hingga 1997, 1004 warga Timor Portugis mendapat visa khusus untuk menetap di Australia oleh karena berbagai konflik yang terjadi di Timor Leste saat itu dibawah pemerintahan Indonesia. 1,360 lainnya tiba di Australia menggunakan visa turis kemudian menjadi *permanent residents* dengan sponsor dari keluarga mereka di Australia (www.museumvictoria.com.au). Senator Australia Andrew Bartlett, mengatakan dalam laporannya,

“East Timor is a near neighbour of Australia and the world’s newest sovereign state. It is clearly in Australia’s best interests for East Timor to evolve into a strong, prosperous, democratic nation with proper regard for the rule of law.... For Australia, an economically unviable East Timor could threaten national security and that of the region. An unstable East Timor could lead to a flow of refugees to Australia with associated costs” (www.aph.gov.au, 2002).

Melihat pada fenomena imigrasi yang pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh konflik dan instabilitas keamanan di Timor Leste, Australia menginginkan Timor Leste menjadi negara yang makmur, aman dan stabil sehingga tidak muncul konflik dan instabilitas yang dapat menyebabkan arus pengungsi ke Australia seperti yang telah terjadi sebelumnya. Tujuan ini ingin dicapai Australia melalui pelaksanaan *Defence Cooperation Program*, di mana melalui program ini Australia terus mendukung proses pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*), penegakan hukum dan konsolidasi demokrasi. Australia ingin agar Timor Leste dapat dengan baik menangani konflik-konflik internal yang terjadi dan ingin mencegah Timor

Leste menjadi negara gagal yang nantinya membawa dampak-dampak negatif terhadap Australia seperti krisis pengungsi.

Permasalahan arus pengungsi yang disebabkan oleh instabilitas keamanan domestik merupakan permasalahan yang nyata dan sangat relevan saat ini. Beberapa contoh diantaranya adalah krisis pengungsi yang disebabkan oleh konflik di Myanmar dan Siria. Sejak tahun 2011, konflik sosial-politik di Myanmar menyebabkan puluhan ribu pengungsi Rohingya dari Myanmar mengungsi ke negara-negara tetangga (Bangladesh, Thailand, Malaysia, Indonesia, hingga Timor Leste dan Australia) (www.unhcr.org). Perang Siria telah menyebabkan lebih dari 4 juta penduduk Siria hidup sebagai pengungsi di negara-negara tetangga (seperti Jordan, Turki dan Lebanon) dan lebih dari 10 persen pengungsi Siria bahkan melakukan perjalanan hingga mencapai daratan Eropa lewat laut (www.worldvision.org). Krisis-krisis tersebut menjadi contoh nyata bahwa permasalahan kestabilan dan ketidakstabilan keamanan domestik. suatu negara, tidak hanya berdampak pada negara tersebut saja, tetapi dapat membawa dampak-dampak negatif yang signifikan terhadap negara-negara sekitarnya. Oleh karena itu Australia menginginkan agar pemerintahan Timor Leste tidak menjadi negara gagal dan dapat menangani dengan baik berbagai gejolak sosial-politik yang timbul secara domestik, sehingga tidak muncul arus pengungsi yang dapat turut berdampak terhadap Australia sendiri.

Australia ingin agar institusi pemerintahan Timor Leste tumbuh menjadi mapan dan mandiri, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan domestik yang timbul. Misalnya saat Timor Leste mengalami krisis keamanan di tahun 2006-2008 yang disebabkan oleh gerakan pemberontak bersenjata melawan pemerintah, Australia meningkatkan dukungannya untuk pemerintah Timor Leste dengan menambah jumlah personel militer yang menjadi penasihat dan pelatih bagi pelatihan-pelatihan DCP. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen Australia dalam mendukung stabilitas keamanan domestik Timor Leste melalui pembangunan kapasitas (*capacity building*) institusi F-FDTL. Melalui penguatan institusi F-FDTL dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan Australia melalui DCP, Timor Leste ke depan dapat lebih baik dan lebih mandiri lagi dalam menghadapi permasalahan domestik. Peningkatan kapasitas F-FDTL terlihat dengan keberhasilan F-FDTL menanggapi gerakan pemberontakan yang

muncul kedua kalinya di tahun 2013-2015. F-FDTL dapat secara mandiri menangani ancaman gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Mauk Moruk, tanpa adanya intervensi dan bantuan asing seperti yang terjadi pada krisis 2006-2008, dan secara mandiri berhasil mengakhiri gerakan pemberontakan tersebut.

Permasalahan lain yang turut menjadi kekhawatiran bagi Australia dengan keberadaan penegakan hukum Timor Leste yang lemah adalah besarnya resiko Timor Leste menjadi negara transit bagi penyelundupan narkoba ke Australia. Menurut publikasi Tempo Semanal, pada bulan Oktober tertangkap seorang warga Indonesia yang menyelundupkan 2.5 kilogram sabu lewat Airport Internasional Nicolau Lobato di Dili, Timor Leste. Diberitakan oleh media yang sama bahwa dalam bulan Agustus hingga November tahun 2012, telah tertangkap belasan warga negara asing asal Indonesia, Afrika dan Eropa terkait kasus penyelundupan narkoba. Keseluruhan narkoba yang disita dalam kurun waktu tersebut oleh pihak keamanan Timor Leste diperkirakan bernilai antar 10-15 juta dolar Amerika. Tempo Semanal menulis bahwa Xanana Gusmao Perdana Menteri Timor Leste mengakui bahwa Timor Leste mulai dijadikan zona transit bagi para kriminal untuk menyelundupkan narkoba ke negara-negara tetangga Timor Leste, yakni Indonesia dan Australia (Tempo Semanal, 2012).

Penyelundupan-peyelundupan narkoba ke Australia lewat Timor Leste tentunya tidak diinginkan Australia oleh karena Australia turut berkepentingan dalam mendukung Timor Leste meningkatkan kapasitas penegakan hukum sehingga Timor Leste tidak dengan mudah diinfiltrasi oleh para penyelundup narkoba. Oleh karena itu, pelatihan keamanan perbatasan (*border security*) dan keamanan maritime (*maritime security*) bagi F-FDTL merupakan pelatihan yang penting agar Timor Leste dapat lebih baik lagi menjaga keamanan perbatasannya demi mencegah aktivitas ilegal transnasional yang tidak diinginkan baik oleh Timor Leste maupun Australia.

5. KESIMPULAN

Keamanan Australia memiliki keterkaitan dan tidak terlepas dari keamanan negara-negara di sekitarnya sehingga Australia tidak dapat mencapai kepentingan keamanannya sendirian secara terisolasi dari negara-negara lain. Dalam melindungi dan meningkatkan keamanannya, Australia perlu membangun kerjasama dengan negara-negara di sekitarnya

termasuk Timor Leste. Oleh karena itu, *Defence Cooperation Program* merupakan bagian penting dalam strategi keamanan Australia dan dilakukan demi memenuhi kepentingan keamanan nasional Australia dalam sector keamanan militer maupun maritime.

DAFTAR PUSTAKA

- Australia Foreign Minister. 2002. *Advancing The National Interest: Australian Foreign Policy Challenge*. Web. http://foreignminister.gov.au/speeches/2002/020507_fa_whitepaper.html.
- Australian Institute Of Criminology. 2010. *Illegal, Unregulated And Unreported Fishing*. Web. <http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/rpp/100-120/rpp109/08.html>.
- Australian National Security. 2015. *Overseas Terrorist Attacks*. Web. <http://www.nationalsecurity.gov.au/securityandyourcommunity/pages/overseasterroristattacks.aspx>.
- Australian Strategic Policy Institute. 2002. *New Neighbour, New Challenge: Australia and the Security of East Timor*. Australian Strategic Policy Institute.
- Australian Strategic Policy Institute. 2011. *A Reliable Partner: Strengthening Australia – Timor Leste Relations*. Web. https://www.aspi.org.au/publications/special-report-issue-39-a-reliable-partner-strengthening-australia-timor-leste-relations/6_59_12_PM_SR39_Timor-Leste.pdf.
- Axelrod R., Keohane R. O.. 1985. *Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions*, dalam *World Politics*, Vol. 38, No. 1.. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Bateman, S., Bergin, A.. 2012. *To Help East Timor, Look To The Sea*. The Australian. Web. <http://www.theaustralian.com.au/newsworld/to-help-east-timor-look-to-the-sea/>.
- Bateman, S., Bergin, A., Channer, H.. 2013. *Strategy: Terms of Engagement: Australia's Regional Defence Diplomacy*. Canberra: Australian Strategic Policy Institute.

- Bergen, P., Garrett, L.. 2005. *Report of the Working Group On State Security And Transnational Threats*. New Jersey: Princeton University.
- Budiarjo, M.. 2009. *Pengantar Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bueger, C.. 2015. *What is Maritime Security?*. Wales: Cardiff University.
- Buzan, B.. 1991. *New Patterns of Global Security in the 21st Century*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Buzan, B.. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press.
- Cohen, R., Mihalka, M..2001. *Cooperative Security: New Horizons for International Order*. Garmisch-Partenkirchen: The Marshall Center Papers.
- Department of Defence. 2000. *2000 Defence White Paper*. Web. <http://www.defence.gov.au/publications/wpaper2000.pdf>.
- Department of Defence. 2003. *Annual Defence Report 2002-2003*. Web. <http://www.defence.gov.au/AnnualReports/02-03/pdf/dar0203full.pdf>.
- Department of Defence. 2004. *Annual Defence Report 2003-2004*. Web. <http://www.defence.gov.au/AnnualReports/03-04/download/full.pdf>.
- Department of Defence. 2005. *Annual Defence Report 2004-2005*. Web. http://www.defence.gov.au/AnnualReports/0405/downloads/0405_DAR_10_full.pdf.
- Department of Defence. 2006. *Annual Defence Report 2005-2006*. Web. http://www.defence.gov.au/AnnualReports/05-06/downloads/2005-2006_Defence_DAR_19_v1full.pdf.
- Department of Defence. 2007. *Annual Defence Report 2006-2007*. Web. http://www.defence.gov.au/AnnualReports/06-07/2006-2007_Defence_DAR_13_v1_full.pdf
- Department of Defence. 2008. *Annual Defence Report 2007-2008*. Web. http://www.defence.gov.au/AnnualReports/07-08/2007-2008_Defence_DAR_13_v1_full.pdf
- Department of Defence. 2009. *Annual Defence Report 2008-2009*. Web. http://www.defence.gov.au/AnnualReports/08-09/2008-2009_Defence_DAR_v1full.pdf.
- Department of Defence. 2009. *Defence White Paper 2009*. Web. http://www.defence.gov.au/CDG/Documents/defence_white_paper_2009.pdf.
- Department of Defence. 2010. *Annual Defence Report 2009-2010*. Web. http://www.defence.gov.au/AnnualReports/09-10/dar_0910_v2_full.pdf.
- Department of Defence. 2011. *Annual Defence Report 2010-2011*. Web. http://www.defence.gov.au/AnnualReports/10-11/dar_1011_v1_full.pdf.
- Department of Defence. 2012. *Annual Defence Report 2011-2012*. Web. http://www.defence.gov.au/AnnualReports/11-12/dar_1112_1.pdf.
- Department of Foreign Affairs and Trade. 2015. *The 2014-15 development assistance budget: a summary*. Web. <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australian-aid-development-policy.pdf>.
- Dorling, P.. 2011. *Timor Rejected China's Spy Offer*. The Sydney Morning Herald. <http://www.smh.com.au/world/timor-rejected-chinese-spy-offer-20110509-1efv1.html>.
- East Timor Law and Justice Bulletin. 2012. *F-FDTL Detain 100 Illegal Fishers*. Web. <http://www.easttimorlawandjusticebulletin.com/2012/03/f-fdtl-detain-100-illegal-fishermen.html>
- East Timor Law And Justice Bulletin. 2012. *Terrorists Have Entered Timor-Leste, Says Indonesian Army*. Web. <http://www.easttimorlawandjusticebulletin.com/2012/10/terrorists-have-entered-timor-leste.html>.

- East Timor Law and Justice Bulletin. 2013. *Drug Trafficking in Timor Leste*. Web. <http://www.easttimorlawandjusticebulletin.com/2013/04/drug-trafficking-in-timor-leste.html>.
- Horta, L. 2014. *Timor Leste: Lessons of a Failing State?*. Yale Global Online. Web. <http://yaleglobal.yale.edu/content/timor-leste-lessons-failing-state>.
- Jackson-Preece, J.. 2011. *Security in International Relations*. London: University of London.
- Jonsson, C., Tallberg, J.. 2001. *Institutional Theory in International Relations*. Lund: Lund University Publication.
- Minister for Foreign Affairs. *The New Aid Paradigm*. Web. http://foreignminister.gov.au/speeches/pages/2014/jb_sp_140618.aspx.
- Moleong, L. J.. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moodie, M.. 2000. *Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations*. United States: The Cooperative Monitoring Center, Sandia National Laboratories.
- Museum Victoria. 2015. *History of Immigration from East Timor*. Web. <http://museumvictoria.com.au/origins/history.aspx?pid=14>.
- Nautilus Institute. 2015. *Defence Cooperation Program – South Pacific*. Nautilus Institute. Web. <http://nautilus.org/publications/books/australian-forces-abroad/pacific-islands/defence-cooperation-program-south-pacific/>
- Nautilus Institute. 2015. *Government Statements - Rudd Government*. Nautilus Institute. Web. <http://nautilus.org/publications/books/australian-forces-abroad/east-timor/government-statements-rudd-government/>. Diakses pada 2 Desember 2015, 15.05 WITA.
- Office of the Secretary of State for Promotion of Equality. *Timor Leste Beijing for Action National Review and Appraisal Report*. 2014. Office of the Secretary of State for Promotion of Equality. United Nations ESCAP.
- Paleri, P.. 2008. *National Security: Imperatives and Challenges*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education.
- Paleri, P. 2014. *Integrated Maritime Security: Governing the Ghost Protocol*. India: Vij Books India Pvt Ltd.
- Parliament of Australia. 2002. *Minority Report. East Timor Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis, Submissions No. 14*. Web. http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=jsct/timor/report%5cminorityreport.pdf.
- Parliament of Australia. 2014. *Boat Arrivals in Australia: A Quick Guide to the Statistics*. Web. http://www.aph.gov.au/About/Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/QG/BoatArrivals.
- Pick, A. C.. 2011. *The Nation State: An Essay*. Web. <http://www.thenationstate.co.uk/TheNationState.pdf>.
- Perwita, A. A. B., Yani, Y. M.. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Royal Australian Engineers. 2011. *Australian Sapper 2011*. Web. http://www.raefoundation.org.au/images/Sapper-Magazine/Sapper_2011.pdf.
- Siitonen, L.. 1990. *Political Theories of Development: A Study of Theories of International Cooperation*. Finland: UNU-WIDER.
- Sorensen, G., Jackson, R.. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Tempo Semanal. 2010. *Timorese Water Vulnerable, F-FDTL and PNTL Joint Operation, Caught Three Nation Joint Illegal Fisherman*. Dili: Tempo Semanal.

- Tempo Semanal. 2012. *More Indonesian Drug Dealers Detained*. Dili: Tempo Semanal.
- Tempo Semanal. 2012. *Dili Became A Gate for Drugs: Future Generation in Danger*. Dili: Tempo Semanal.
- The Sydney Morning Herald. 2005. *Al-Qaeda Slipped Into East Timor: Report*. Web. <http://www.smh.com.au/news/global-terrorism/alqaeda-slipped-into-east-timor-reports/2005/03/10/1110417610691.html>
- The Sydney Morning Herald. 2012. *Assylum Seekers Find No Solution in East Timor*. Web. <http://www.smh.com.au/world/asylum-seekers-find-no-solution-in-east-timor-20120422-1xf26.html>.
- United Nations High Commissioner of Refugees. 2002. *Sri Lankan Boat People Disembark in East Timor*. Web. <http://www.unhcr.org/3d4abe5b4.html>
- United Nations High Commissioner of Refugees. 2014. *More Than 20,000 People Risk All On Indian Ocean to Reach Safety: UNHCR Report*. Web. <http://www.unhcr.org/53f741fc9.html>.
- United Nations Independent Special Commission of Inquiry for Timor Leste. 2006. *Report of the United National Special Commission of Inquiry for Timor Leste*. Web. <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/COITimorLeste.pdf>.
- World Vision. 2015. *What you need to know: Crisis in Syria, refugees, and the impact on children*. Web. <http://www.worldvision.org/news-stories-videos/syria-war-refugee-crisis>.
- Zartman, I. W., Touval, S.. 2010. *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. Cambridge: Cambridge University Press.